

**STRATEGI KOMUNIKASI POLRI RAMAH ANAK DI WILAYAH POLDA
KEPULAUAN RIAU MELALUI PENDEKATAN MULTIDIMENSI**

Nona Pricillia Ohei¹, Tria Patrianti², Hardy R. Hermawan³

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia

³Program Studi Doktor Manajemen Berkelanjutan, Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia
Email Korespondensi: nonaohei1976@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of child-friendly communication strategies by the Indonesian National Police (Polri) in the Riau Islands region, in response to escalating threats to child protection in the digital era. Technological disruption has given rise to new phenomena—such as cyberbullying, online sexual exploitation, online gambling, and information manipulation—that primarily victimize children. In the local context of the Riau Islands, social complexities arising from high mobility and a strategic international border location heighten the urgency of adopting communication strategies that are more humanistic and inclusive. This study employs an exploratory qualitative approach with a phenomenological design, involving six key informants from the police force, child protection agencies, and experts in child psychology and psychiatry. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), passive observation, and document analysis, and subsequently analyzed using reflexive thematic analysis and critical discourse analysis. The findings reveal that Polri's child-friendly communication strategy is executed across five key dimensions: humanistic, participatory, educational, collaborative, and digital. The integration of these five dimensions not only strengthens public legitimacy regarding the police force but also presents a modern, empathetic, and adaptive police image that addresses the needs of children in the digital era.

Keywords: Child-friendly communication, Polri, Public trust, Riau Islands, Communication strategy.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi strategi komunikasi ramah anak oleh Polri di wilayah Kepulauan Riau sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman perlindungan anak di era digital. Disrupsi teknologi telah memunculkan fenomena baru seperti perundungan siber, eksploitasi seksual daring, judi online, dan manipulasi informasi yang menempatkan anak sebagai korban utama. Dalam konteks lokal Kepulauan Riau, kompleksitas sosial akibat mobilitas tinggi dan posisi strategis perbatasan internasional memperkuat urgensi penerapan strategi komunikasi yang lebih humanis dan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan desain fenomenologi, melibatkan enam informan kunci dari unsur kepolisian, lembaga perlindungan anak, serta pakar psikologi dan psikiatri anak. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD, observasi pasif, dan studi dokumen, kemudian dianalisis dengan *reflexive thematic analysis* dan *critical discourse analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi ramah anak Polri dijalankan melalui lima dimensi utama: humanis, partisipatif, edukatif, kolaboratif, dan digital. Integrasi kelima dimensi ini tidak hanya memperkuat legitimasi publik terhadap Polri, tetapi juga menghadirkan wajah kepolisian yang modern, empatik, dan adaptif terhadap kebutuhan anak di era digital.

Kata kunci: Komunikasi ramah anak, Polri, kepercayaan publik, Kepulauan Riau, Strategi komunikasi.

PENDAHULUAN

Dinamika perlindungan anak di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar seiring dengan disrupsi teknologi digital. Ancaman terhadap hak-hak dasar dan keselamatan anak tidak lagi terbatas pada ruang fisik konvensional, melainkan telah bermigrasi secara agresif ke ranah siber. Data nasional menunjukkan peningkatan kasus yang menempatkan anak sebagai korban utama kejahatan digital, mulai dari perundungan siber, eksploitasi seksual daring, penetrasi judi online, hingga manipulasi informasi yang memicu kenakalan remaja (Livingstone et.al., 2020; KemenPPPA, 2024).

Kompleksitas ini menegaskan bahwa pendekatan hukum pidana yang kaku dan represif tidak memadai. Polri dituntut hadir di hulu melalui strategi komunikasi publik yang preventif, edukatif, dan persuasif (Wahyudi, 2022; Dhona, 2019).

Fenomena ini semakin nyata di wilayah Kepulauan Riau, daerah strategis yang berbatasan dengan jalur pelayaran internasional dan negara tetangga. Mobilitas penduduk yang tinggi di Batam dan Tanjungpinang berdampak pada kompleksitas sosial, termasuk pelanggaran hak anak. Data SIMFONI PPA menunjukkan angka kekerasan terhadap anak di wilayah ini memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Penerapan strategi komunikasi ramah anak oleh Bidhumas Polda Kepri menjadi intervensi terstruktur yang melibatkan pemahaman regulasi perlindungan anak, produksi narasi edukasi hukum sesuai psikologi perkembangan anak, serta kemitraan strategis dengan sekolah, LSM, dan media massa. Keberhasilan atau kegagalan implementasi strategi ini akan berdampak langsung pada citra kemanusiaan Polri di mata publik.

Komunikasi ramah anak merupakan pendekatan interaksional yang mempertimbangkan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak (Lundy, 2007). Prinsip utamanya adalah penghormatan martabat, penciptaan rasa aman, dan pemberian ruang partisipasi. Fine dan Padilla (2019) menunjukkan bahwa bahasa yang menghargai dan sikap tidak intimidatif meningkatkan legitimasi polisi di kalangan remaja.

Guevara et al. (2016) menekankan bahwa komunikasi ramah anak bukan sekadar child-centered communication, melainkan pendekatan sistematis yang menyesuaikan tahap perkembangan anak. Lamb et.al. (2008) menambahkan bahwa teknik bertanya terbuka, bahasa sederhana, dan setting yang minim tekanan psikologis menjadi inti komunikasi kepolisian ramah anak.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai strategi komunikasi ramah anak yang dijalankan oleh Polri, khususnya di wilayah Kepulauan Riau, dalam rangka memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Pertanyaan ini penting karena komunikasi ramah anak bukan sekadar teknis penyampaian pesan, melainkan sebuah pendekatan strategis yang menyentuh aspek legitimasi sosial dan citra kemanusiaan Polri di mata masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha menyajikan cara aparat kepolisian menjalankan prinsip-prinsip komunikasi yang berorientasi pada anak dalam praktik komunikasi sehari-hari di lapangan. Fokusnya tidak hanya pada dimensi normatif berupa regulasi dan pedoman, tetapi juga pada dinamika interaksi nyata antara aparat dan anak sebagai kelompok rentan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi strategi komunikasi ramah anak yang dijalankan Polri. Analisis ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan akademis dalam memperkaya literatur komunikasi kepolisian, khususnya yang berpusat pada anak, serta memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi Polri dalam mengembangkan kapasitas kehumasan dan pelayanan publik yang lebih humanis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pemetaan fenomena, tetapi juga pada pencarian solusi yang relevan untuk menghadapi tantangan perlindungan anak di era digital.

Penelitian ini berangkat dari urgensi perlindungan anak di era digital, fenomena kerentanan sosial di Kepulauan Riau, serta kebutuhan Polri untuk mengimplementasikan strategi komunikasi ramah anak yang humanis, partisipatif, edukatif, kolaboratif, dan digital. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan komunikasi kehumasan Polri di masa depan.

Penelitian ini berlandaskan teori strategi komunikasi dan teori komunikasi ramah anak (child-centered

communication). Strategi komunikasi dipahami sebagai kombinasi perencanaan dan manajemen pesan yang diarahkan untuk mencapai tujuan strategis tertentu. Cangara (2017) menekankan bahwa efektivitas strategi komunikasi bergantung pada keselarasan isi pesan dengan media yang digunakan serta kondisi psikologis khalayak sasaran. Rogers (2003) menambahkan bahwa keberhasilan strategi ditentukan oleh kemampuan komunikator dalam mengelola inovasi informasi agar dapat diterima secara difusif dan adaptif oleh masyarakat. Middleton (1980) menekankan pentingnya penciptaan ruang dialogis sebagai inti strategi komunikasi, sementara Effendy (2011) menegaskan bahwa kredibilitas dan kepercayaan merupakan fondasi utama yang harus dibangun dalam setiap proses komunikasi publik.

Sementara itu, teori komunikasi ramah anak berakar pada Konvensi Hak Anak PBB yang kemudian ditransformasikan oleh UNICEF (2021) ke dalam pedoman komunikasi publik. Teori ini menuntut agar setiap bentuk komunikasi menghormati kapasitas kognitif, kematangan emosional, dan hak dasar anak atas rasa aman. Piaget (1972) menjelaskan bahwa anak-anak memproses simbol dan bahasa secara berbeda dari orang dewasa, sehingga kegagalan dalam menyesuaikan kode komunikasi dapat menimbulkan trauma sekunder.

Habermas (1984) menekankan perlunya dekonstruksi dominasi kuasa orang dewasa dalam ruang tutur, sedangkan Littlejohn et.al. (2021) menyoroti hak anak untuk didengar tanpa intimidasi serta perlindungan identitas personal mereka dalam ruang publik. Dengan demikian, komunikasi ramah anak bukan sekadar “child-centered” dalam arti sentimental, melainkan pendekatan sistematis yang menyesuaikan tahap perkembangan kognitif, emosional, dan linguistik anak, sehingga interaksi menjadi inklusif, tidak menekan, dan menghormati martabat anak.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dengan fokus pada kawasan urban Kota Tanjungpinang dan Batam. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis mengenai kompleksitas wilayah perbatasan internasional yang memicu tingginya intensitas interaksi antara aparat penegak hukum dan anak. Dengan karakteristik sosial yang khas, wilayah ini menjadi konteks yang relevan untuk menelaah bagaimana strategi komunikasi ramah anak dijalankan oleh kepolisian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan desain fenomenologi yang berakar pada paradigma konstruktivis-interpretif. Paradigma ini memandang realitas sosial, termasuk praktik komunikasi kepolisian, sebagai hasil konstruksi subjektif yang dinegosiasikan melalui interaksi antarindividu, sehingga memungkinkan peneliti menangkap makna mendalam dari pengalaman aktor yang terlibat.

Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung, relevansi pengalaman empiris, serta kapasitas reflektif dalam ekosistem komunikasi ramah anak. Komposisi informan berjumlah enam orang yang terdiri dari unsur internal kepolisian, yakni Kapolda, Direktur Binmas, dan Direktur Lalu Lintas, serta unsur eksternal, yaitu Kepala UPTD PPA, psikolog anak, dan psikiater anak. Pembatasan jumlah informan bertujuan menjaga prinsip saturasi data tanpa mengurangi ketajaman analisis. Informasi dari Humas Polda Kepri tidak dijadikan narasumber primer, melainkan diperoleh melalui dokumen sekunder resmi seperti laporan kegiatan dan publikasi internal. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi partisipan pasif. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali narasi personal dan persepsi emosional, sementara FGD diterapkan pada kelompok aparat kepolisian untuk mengeksplorasi pemahaman kolektif serta kendala kultural. Observasi pasif dilakukan pada kegiatan pelatihan atau interaksi rutin kepolisian guna merekam perilaku komunikasi nonverbal dalam setting alamiah.

Data primer diperkuat dengan data sekunder melalui studi dokumen sistematis yang mencakup kebijakan formal Polri, laporan tahunan, materi kampanye publik, dan arsip pemberitaan media. Strategi pengumpulan data berlapis ini memungkinkan triangulasi metode dan sumber sehingga validitas temuan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis data menggunakan pendekatan *thematic analysis*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

yang dipadukan dengan *discourse analysis*. Proses dimulai dengan transkripsi verbatim dan pembacaan berulang untuk menangkap esensi makna, dilanjutkan dengan kategorisasi berkode untuk menghasilkan tema-tema potensial.

Framework analysis digunakan untuk mengorganisasi data berdasarkan dimensi institusional, interaksional, dan persepsual. Interpretasi akhir dilakukan dengan mengonseptualisasikan tema ke dalam kerangka teori komunikasi persuasif, disonansi kognitif, dan legitimasi prosedural. Seluruh proses analisis berlangsung secara iteratif dan sirkular, di mana peneliti bergerak aktif antara data mentah, kode, tema, dan teori untuk menghasilkan kesimpulan yang kokoh dan reflektif.

PEMBAHASAN

Creswell (2018) menegaskan bahwa peneliti kualitatif harus memilih partisipan yang secara langsung mengalami fenomena yang sedang diteliti agar data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Dalam penelitian ini, pemilihan informan kunci didasarkan pada prinsip kesesuaian informasi. Berikut tabel 1 yang menjelaskan rincian karakteristik informan penelitian yang telah diwawancarai untuk kepentingan analisis ini:

Tabel 1: Karakteristik narasumber

Kode Informan	Jabatan / Afiliasi Profesional	Peran dalam Penelitian	Fokus Informasi
IP-01	Kapolda Kepulauan Riau	Informan Primer	Visi strategis kepolisian ramah anak dan kebijakan makro Polda Kepri
IP-02	Direktur Lalu Lintas Polda Kepri	Informan Primer	Implementasi edukasi keselamatan berkendara ramah anak di jalan raya
IP-03	Direktur Binmas Polda Kepri	Informan Primer	Program pembinaan masyarakat dan pencegahan kejahatan anak di pesisir
IS-01	Kepala UPTD PPA Kepulauan Riau	Informan Sekunder	Evaluasi penanganan kasus anak dan sinergi lintas lembaga di lapangan
IS-02	Psikolog Klinis Anak	Informan Sekunder	Standar psikologis komunikasi verbal dan nonverbal ramah anak
IS-03	Psikiater Anak dan Remaja	Informan Sekunder	Dampak trauma klinis proses hukum pada anak dan pencegahan labeling

Sumber: Hasil penelitian, 2026

Berdasarkan karakteristik informan yang tercantum dalam tabel 1, diketahui bahwa strategi komunikasi kepolisian dalam pelayanan publik menuntut perencanaan matang. Grunig dan Hunt (1984) menekankan model komunikasi simetris dua arah, di mana organisasi dan publik memiliki kedudukan setara. Pendekatan ini penting bagi anak-anak karena mengikis dominasi otoritas aparat yang sering menjadi hambatan psikologis. Gashi (2024) menambahkan bahwa narasi institusi publik harus fleksibel agar sesuai dengan karakteristik psikologis sasaran, sementara Cangara (2017) menegaskan perlunya integrasi sistematis dari sumber pesan hingga efek komunikasi.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Implementasi Strategi Komunikasi Ramah Anak

Polda Kepri mengadopsi teori manajemen komunikasi modern dengan memadukan model simetris dan kearifan lokal. Ruslan (2019) menekankan keberhasilan humas pemerintah diukur dari kemampuan mengelola opini publik secara persuasif. Pendekatan instruktif yang kaku diganti dengan komunikasi dialogis agar anak merasa lebih terbuka. Hal ini menuntut kesiapan kognitif personel, termasuk pemahaman psikologi perkembangan anak (Semiawan, 2018). Pelatihan terstruktur diperlukan agar aparat mampu membaca situasi emosional anak secara akurat.

Selain itu, perspektif humanis menjadi krusial. Rogers (2020) menekankan penerimaan tanpa syarat sebagai modal komunikasi terapeutik, sementara Mangunhardjana (2016) menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia. Aparat harus menanggalkan kesan militeristik dan menampilkan empati agar anak merasa aman. Pengetahuan regulasi juga wajib, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan konvensi internasional (Doek, 2019; Santoso, 2021). Pemahaman hukum yang baik melahirkan tindakan aparat yang terukur dan adil.

Isi pesan hukum harus dikemas kreatif agar mudah dipahami anak. Piaget (2017) menjelaskan bahwa anak pada fase operasional konkret membutuhkan contoh nyata. Oleh karena itu, materi hukum disampaikan melalui cerita dan permainan (Sukmadinata, 2019). Dalam rilis kasus publik, identitas anak harus dilindungi ketat (McCombs, 2018; Ali, 2020) untuk mencegah stigma sosial. Bahasa yang digunakan aparat juga harus non-intimidatif, menghindari nada tinggi atau ancaman. Bandura (2016) menunjukkan bahwa lingkungan verbal agresif memicu trauma, sementara Mulyana (2022) menekankan pentingnya bahasa santun.

Interaksi tatap muka dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus anak dengan interior ramah anak. Bordin (2018) dan Alwisol (2019) menegaskan bahwa lingkungan fisik memengaruhi keterbukaan dan ketenangan psikologis. Selain itu, media digital simetris dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan komunikasi. Konten edukasi berupa video pendek dan animasi interaktif diproduksi, dengan ruang diskusi terbuka di media sosial (Kapferer, 2021; Suryadi, 2023). Seluruh strategi dijalankan melalui lima dimensi operasional yang terintegrasi, sebagaimana dirangkum dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2: Strategi Komunikasi Ramah Anak Polda Kepri

Dimensi Operasional	Landasan Teoretis	Indikator Praktik di Lapangan	Target Capaian Kinerja
Kompetensi Kognitif	Grunig & Hunt (1984); Semiawan (2018)	Pelatihan psikologi anak untuk personel umum	Personel mampu berdialog tanpa memicu trauma
Sikap Humanis	Rogers (2020); Mangunhardjana (2016)	Penerapan empati dan bahasa tubuh sejajar	Terwujudnya rasa aman pada anak
Simplifikasi Pesan	Gashi (2024); Sukmadinata (2019)	Pembuatan materi edukasi visual non-jargon	Anak memahami aturan hukum sederhana
Proteksi Privasi	McCombs (2018); Ali (2020)	Sensor identitas anak pada rilis media	Nol kasus kebocoran data anak ke publik
Interaksi Simetris	Cangara (2017); Suryadi (2023)	Pemanfaatan ruang khusus dan media sosial	Peningkatan indeks kepercayaan masyarakat

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Tabel ini memperjelas arah kebijakan komunikasi Polda Kepri agar tidak berjalan parsial. Seluruh unit bergerak serentak menuju standar pelayanan yang sama, dengan pengawasan internal ketat untuk mencegah deviasi. Melalui tata kelola integratif, Polda Kepri optimistis menghadirkan wajah kepolisian

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

yang modern sekaligus humanis bagi masyarakat Kepulauan Riau.

Dimensi Humanis

Strategi komunikasi kepolisian juga berfokus pada transformasi perilaku aparat saat berhadapan dengan anak. Perubahan ini dimulai dari gestur tubuh yang lembut dan bebas intimidasi. Polisi dilatih untuk menyelaraskan posisi tubuh sejajar dengan tinggi anak, misalnya dengan menunduk atau berlutut, sehingga citra menakutkan aparat dapat terkikis. Penyesuaian nonverbal ini menciptakan atmosfer aman bagi perkembangan emosi anak dan menjadikan komunikasi memiliki dimensi humanis.

Aparat juga diminta menanggalkan atribut operasional mencolok agar tidak menimbulkan ketegangan psikologis. Thompson (2018) menegaskan bahwa kehangatan nonverbal dari figur otoritas publik efektif menurunkan defensif kelompok rentan, sementara Rakhmat (2016) menekankan keselarasan pesan verbal dan nonverbal sebagai prasyarat hubungan interpersonal yang saling percaya.

Aspek kedua adalah pemilihan diksi bebas stigma. Polisi dilarang menggunakan label negatif seperti “anak nakal” atau “pelaku kriminal.” Bahasa hukum formal diganti dengan kata-kata netral dan mengayom agar harga diri anak tetap terlindungi. Link (2019) menyebutkan pelabelan buruk berisiko mengunci identitas menyimpang hingga dewasa, sedangkan Liliweri (2017) menekankan bahwa diksi aparaturnya mencerminkan kualitas peradaban dan empati lembaga. Dengan bahasa non-stigmatisasi, Polda Kepri berhasil meminimalkan trauma sosial anak.

Interaksi tatap muka juga menekankan empati dan penghormatan hak anak. Polisi bertindak sebagai pendengar aktif, menanggapi keluhan dengan sabar tanpa menghakimi. Anak ditempatkan di ruang khusus terpisah dari pemeriksaan dewasa, sehingga merasa dihargai dan dilindungi. Hubungan emosional positif ini mengikis citra militeristik masa lalu. Dimensi humanis diperkuat regulasi internal kepolisian yang mewajibkan prinsip humanis, edukatif, dan empati. Kapolda Kepri (IP-01) menegaskan bahwa komunikasi ramah anak adalah kewajiban menghormati hak anak untuk didengar sesuai usianya, menjadi kompas moral bagi penyidik dan petugas binmas.

Dimensi Partisipatif

Anak dijadikan subjek aktif dengan hak penuh menyatakan pandangan. Polda Kepri memberi akses bagi anak menyampaikan pendapat, keluhan, atau saran di forum resmi maupun informal. Anak tidak lagi sekadar objek instruksi hukum, melainkan peserta aktif dalam dialog sosialisasi. Lundy (2017) menegaskan bahwa ruang berbicara bagi anak adalah fondasi hak asasi global, sementara Hardjana (2018) menekankan efektivitas komunikasi partisipatif saat masyarakat rentan diberi hak penuh menentukan arah dialog. Ruang aman menjadi prasyarat partisipasi dan komunikasi memiliki dimensi partisipatif.

Polda Kepri menyediakan kotak saran khusus anak dan area berekspresi di Ruang Pelayanan Khusus. Lingkungan bebas ancaman ini memungkinkan anak melaporkan kekerasan secara sukarela. Bordin (2018) menyatakan tata ruang ramah menstimulasi keterbukaan informasi dari subjek trauma, sedangkan Moleong (2019) menekankan suasana akrab tanpa intimidasi sebagai kunci menggali informasi kualitatif. Dengan ruang aman, kualitas data hukum meningkat.

Bahasa adaptif juga penting. Polisi harus mereduksi istilah hukum kompleks menjadi kalimat sederhana. Metafora dunia bermain digunakan untuk anak usia dini, sementara remaja diajak berdiskusi santai namun berbobot. Fleksibilitas bahasa mencegah kesalahpahaman dan memposisikan polisi sebagai mitra dialog menyenangkan. Dimensi partisipatif mendapat dukungan praktisi perlindungan anak. Kepala UPTD PPA Kepri (IS-01) merekomendasikan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melibatkan Forum Anak dalam program kepolisian. Sinergi lintas sektor ini memastikan partisipasi anak bukan slogan, melainkan program nyata yang terukur, menjadikan kepolisian wadah ramah bagi tumbuh kembang pemikiran kritis generasi muda.

Berikut ringkasan narasi Anda menjadi sekitar 500 kata (setengah dari panjang awal), dengan tetap mempertahankan kutipan:

Dimensi Edukatif

Polda Kepri menyusun pesan keselamatan lalu lintas dan kesadaran kamtibmas dalam bentuk interaktif, menghindari diksi ancaman hukuman penjara yang menakutkan. Narasi lebih menekankan keuntungan logis dari perilaku taat hukum, sehingga kesadaran hukum tumbuh organik dari dalam diri anak melalui proses edukatif. Piaget (2017) menegaskan bahwa anak fase operasional konkret membutuhkan visualisasi nyata untuk memahami aturan abstrak. Sukmadinata (2019) juga menekankan efektivitas penyuluhan publik bergantung pada kesesuaian materi dengan perkembangan intelektual sasaran. Polda Kepri konsisten menyederhanakan materi hukum agar mudah dipahami.

Sosialisasi regulasi perlindungan anak dilakukan masif melalui majalah internal, buletin, dan infografis digital. Materi diarahkan untuk memberi pemahaman kepada orang tua mengenai disiplin tanpa kekerasan serta bahaya eksploitasi anak. Media kehumasan menjadi jembatan edukasi publik, membangun ekosistem masyarakat sadar perlindungan anak. McCombs (2018) menekankan agenda komunikasi lembaga publik mampu mengarahkan perhatian masyarakat pada isu sosial krusial, sementara Suryadi (2023) menilai pemanfaatan media institusional efektif membentuk opini publik positif dan mendukung pencegahan kejahatan dini.

Bagian penting dari dimensi edukatif adalah penyusunan rilis kasus dengan perspektif edukatif, bukan koersif. Humas Polda Kepri mengubah format rilis media konvensional: narasi tidak mengeksploitasi kesalahan anak, tetapi menyoroti akar masalah sosial. Publik diajak melihat kasus sebagai evaluasi pola asuh keluarga dan sekolah. Rilis diarahkan untuk memberi pembelajaran sosial agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus melindungi masa depan anak dari hukuman sosial. Pandangan klinis dari Psikolog Anak (IS-02) menekankan komunikasi harus sederhana, bebas intimidasi, dan aman. Pedoman ini diadopsi Humas Polda Kepri, membuktikan penegakan hukum dapat berjalan beriringan dengan fungsi edukasi masyarakat.

Dimensi Kolaboratif

Kolaborasi menekankan integrasi peran orang tua, sekolah, dan pekerja sosial. Polda Kepri menyadari kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani kompleksitas masalah anak. Polisi membangun jaringan komunikasi aktif dengan sekolah melalui program inspektur upacara, bertukar informasi dengan orang tua, dan melibatkan pekerja sosial untuk pendampingan. Brysons (2018) menegaskan kolaborasi lintas sektor menghasilkan efisiensi sumber daya dan memperkuat dampak kebijakan sosial. Dwiyanto (2021) menambahkan bahwa sinergi aparat hukum dan komunitas lokal menjadi kunci reformasi pelayanan publik.

Sinergi internal antarunit Polri juga penting. Direktorat Binmas, Unit PPA, dan Bidang Humas Polda Kepri merancang program lintas fungsi: Binmas melakukan penyuluhan kreatif, PPA memberi masukan teknis perlindungan hukum, dan Humas menyebarkan pesan positif ke ruang siber. Kerja sama ini menghilangkan ego sektoral. Moore (2019) menekankan penciptaan nilai publik melalui keselarasan fungsi birokrasi, sementara Prasjojo (2022) menilai keterpaduan aksi antarunit menjadi tolok ukur modernisasi kultur organisasi. Sinergi internal mencerminkan postur kepolisian modern.

Kolaborasi lintas lembaga dengan pemerintah daerah juga dijalankan. Polda Kepri bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Lembaga Perlindungan Anak provinsi. Kerja sama ini menghasilkan materi edukasi bersama dan operasi simpatik di ruang publik. Kehadiran aktivis anak berdampingan dengan polisi meningkatkan kepercayaan masyarakat. Legitimasi hukum dibangun lewat kesepakatan nilai bersama, bukan tindakan represif. Berdasarkan wawancara dengan Dirlantas (IP-02) dan Dirbinmas Polda Kepri (IP-03), penerapan konsep ramah anak dilakukan dengan penyesuaian metode komunikasi agar menyenangkan dan tidak menakutkan. Masukan berkelanjutan dari praktisi pendidikan dan pekerja sosial memastikan model komunikasi adaptif terhadap kultur masyarakat kepulauan.

Pendekatan Digital

Media sosial resmi Polda Kepri menjadi saluran komunikasi simetris dengan anak-anak dan remaja. Platform digital tidak hanya menyiarkan keberhasilan aparat, tetapi membuka ruang interaktif bagi generasi muda untuk menyampaikan pesan langsung terkait kamtibmas. Pertanyaan warga muda dijawab cepat dengan bahasa santun dan akrab, sehingga birokrasi yang kaku dapat diruntuhkan. Kapferer (2021) menekankan bahwa komunikasi digital modern harus menjadi ruang dialog interaktif, sementara Mulyana (2022) menegaskan pentingnya kesetaraan posisi antara institusi negara dan netizen. Pendekatan ini terbukti efektif merangkul generasi muda siber.

Produksi konten kreatif menjadi kunci utama. Tim kreatif Polda Kepri membuat video pendek, komik digital, dan animasi interaktif dengan tema pencegahan perundungan siber, bahaya narkoba, serta etika berkendara. Konten dikemas dengan warna cerah, musik populer, dan bahasa gaul sopan agar pesan hukum terasa ringan dan viral positif. Gashi (2024) menekankan perlunya narasi publik selaras dengan budaya digital sasaran, sedangkan Ali (2020) menilai konten kreatif mempercepat internalisasi nilai hukum pada remaja.

Aspek lain adalah proteksi privasi anak. Polda Kepri menerapkan protokol penyamaran wajah, suara, dan atribut sekolah dalam publikasi daring. Tujuannya melindungi masa depan anak dari perundungan siber dan stigma sosial permanen. Psikiater Anak (IS-03) menegaskan urgensi perlindungan dari depresi jangka panjang akibat publikasi tidak ramah anak. Karena jejak digital sulit dihapus, Bidang Humas menerapkan pengawasan berlapis sebelum menayangkan konten. Pada akhirnya, pendekatan digital menjadi dimensi lain dalam komunikasi ramah anak oleh Pold Kepulauan Riau, seperti dijelaskan dalam tabel 3.

Tabel 3: Dimensi Komunikasi Ramah Anak Polda Kepri

Dimensi Analitis	Landasan Teoretis	Bukti Regulasi & Wawancara Empiris	Fokus Tindakan Operasional di Lapangan
Dimensi Humanis	Thompson (2018); Rakhmat (2016); Link (2019); Liliweri (2017)	Regulasi Pelayanan Publik Polri; Wawancara Kapolda Kepri (IP-01)	Gestur tubuh sejajar, bebas intimidasi, penolakan diksi stigmatisasi
Dimensi Partisipatif	Lundy (2017); Hardjana (2018); Bordin (2018); Moleong (2019)	Wawancara Kepala UPTD PPA Kepulauan Riau (IS-01)	Jaminan hak berpendapat anak, penyediaan tata ruang aman dan nyaman
Dimensi Edukatif	Piaget (2017); Sukmadinata (2019); McCombs (2018); Suryadi (2023)	Wawancara Psikolog Klinis Anak (IS-02)	Produksi narasi pencegahan hukum, rilis media edukatif non-koersif
Dimensi Kolaboratif	Brysons (2018); Dwiyanto (2021); Moore (2019); Prasojjo (2022)	Wawancara Dirlantas (IP-02) & Dirbinmas Polda Kepri (IP-03)	Integrasi peran orang tua-sekolah, sinergi internal fungsi Binmas-PPA
Dimensi Digital	Kapferer (2021); Mulyana (2022); Gashi (2024); Ali (2020)	Wawancara Psikiater Anak dan Remaja (IS-03)	Media digital simetris, video animasi kreatif, sensor identitas

			anak siber
--	--	--	------------

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Tabel 3 menunjukkan bahwa pendekatan digital melengkapi empat dimensi lain, sehingga membentuk sistem komunikasi ramah anak yang holistik. Konsistensi penerapan lima dimensi meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian sekaligus memperkuat legitimasi publik terhadap Polda Kepri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa strategi komunikasi ramah anak yang dijalankan Polri di wilayah Kepulauan Riau merupakan sebuah pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi humanis, partisipatif, edukatif, kolaboratif, dan digital. Kelima dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membentuk sistem komunikasi kepolisian yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan anak. Melalui transformasi perilaku aparat, penggunaan bahasa non-stigmatisasi, serta penciptaan ruang interaksi yang aman, Polri berhasil menggeser citra komunikasi dari yang semula kaku dan militeristik menjadi lebih empatik dan humanis.

Partisipasi anak dalam forum resmi maupun informal menunjukkan bahwa kepolisian tidak lagi menempatkan anak sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang berhak menyuarakan pandangan. Dimensi edukatif memperkuat hal ini dengan penyusunan narasi hukum yang sederhana, menyenangkan, dan preventif, sehingga kesadaran hukum tumbuh secara organik dari dalam diri anak. Kolaborasi lintas sektor dengan sekolah, orang tua, pekerja sosial, dan lembaga pemerintah daerah memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dijalankan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pendekatan digital melengkapi keseluruhan strategi dengan memanfaatkan media sosial simetris, konten kreatif, serta proteksi privasi anak. Hal ini menunjukkan bahwa Polri mampu beradaptasi dengan ekosistem budaya siber generasi muda tanpa mengorbankan prinsip keselamatan psikologis anak. Dengan konsistensi penerapan lima dimensi tersebut, Polri di Kepulauan Riau tidak hanya memperkuat legitimasi publik, tetapi juga menghadirkan wajah kepolisian yang modern, humanis, dan inklusif.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur komunikasi kepolisian dengan menegaskan relevansi teori strategi komunikasi dan komunikasi ramah anak dalam konteks lokal Indonesia. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi Polri untuk terus mengembangkan kapasitas kehumasan dan pelayanan publik yang berorientasi pada anak. Pada akhirnya, strategi komunikasi ramah anak bukan hanya instrumen teknis, melainkan fondasi moral dan sosial bagi kepolisian dalam membangun kepercayaan publik di era digital.

REFERENSI

- Ali, M. (2020). *Digital communication and youth engagement*. Jakarta: Prenada Media.
- Alwisol. (2019). *Psikologi kepribadian*. Malang: UMM Press.
- Angrosino, M. (2016). *Doing ethnographic and observational research*. London: Sage.
- Bandura, A. (2016). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bordin, E. S. (2018). *The working alliance: Theory, research, and practice*. New York: Academic Press.
- Bowen, G. A. (2020). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. London: Sage.
- Brubacher, S. P., Powell, M. B., & Skouteris, H. (2016). The effects of practice on children's ability to answer open-ended questions. *Child Abuse & Neglect*, 51, 106–118.
- Bryman, A. (2016). *Social research methods* (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Brysons, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Cangara, H. (2017). *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory* (2nd ed.). London: Sage.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dhona, A. (2019). *Komunikasi publik dan strategi preventif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Doek, J. E. (2019). *Child protection and international law*. The Hague: Kluwer Law International.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, O. U. (2011). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London: Routledge.
- Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Fine, M., & Padilla, M. (2019). Youth-police relations: Communication and legitimacy. *Journal of Youth Studies*, 22(3), 345–360.
- Flyvbjerg, B. (2016). *Case study methodology*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Gashi, A. (2024). *Narratives in public communication*. Berlin: Springer.
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing public relations*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Guevara, J., et al. (2016). Child-centered communication in public institutions. *Communication Research Reports*, 33(2), 112–120.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action*. Boston: Beacon Press.
- Hardjana, A. (2018). *Komunikasi partisipatif*. Jakarta: Gramedia.
- Hovland, C. I., & Weiss, W. (1951). The influence of source credibility on communication effectiveness. *Public Opinion Quarterly*, 15(4), 635–650.
- Kapferer, J. N. (2021). *The new strategic brand management*. London: Kogan Page.
- KemenPPPA. (2024). *Laporan tahunan perlindungan anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2018). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Lamb, M. E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P. W., & Horowitz, D. (2008). *Tell me what happened: Structured investigative interviews of child victims and witnesses*. Chichester: Wiley.
- Liliweri, A. (2017). *Komunikasi antarbudaya*. Jakarta: Prenada Media.
- Link, B. G. (2019). Labeling theory and child identity. *Annual Review of Sociology*, 45, 63–82.
- Livingstone, S., et al. (2020). *Children's rights in the digital age*. London: Routledge.
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2021). *Theories of human communication* (12th ed.). Long Grove, IL: Waveland Press.
- Lundy, L. (2007). 'Voice' is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. *British Educational Research Journal*, 33(6), 927–942.
- McCombs, M. (2018). *Setting the agenda: Mass media and public opinion*. Cambridge: Polity Press.
- Middleton, J. (1980). *Communication theory: An introduction*. New York: McGraw-Hill.
- Moore, M. (2019). *Creating public value*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Morgan, D. L. (2018). *Focus groups as qualitative research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mulyana, D. (2022). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Piaget, J. (1972). *The psychology of the child*. New York: Basic Books.

- Piaget, J. (2017). *Cognitive development and learning*. New York: Routledge.
- Piliang, Y. A. (2018). *Semiotika dan hipersemiotika*. Bandung: Matahari.
- Prasojo, E. (2022). *Reformasi birokrasi di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Rakhmat, J. (2016). *Psikologi komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ritchie, J., Lewis, J., McNaughton Nicholls, C., & Ormston, R. (2020). *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers* (2nd ed.). London: Sage.
- Rogers, C. R. (2020). *A way of being*. Boston: Houghton Mifflin.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Ruslan, R. (2019). *Manajemen public relations dan media komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, T. (2021). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Semiawan, C. (2018). *Psikologi perkembangan anak*. Jakarta: Gramedia.
- Stake, R. E. (2018). *The art of case study research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Sukmadinata, N. S. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, A. (2023). *Komunikasi digital dan opini publik*. Bandung: Alfabeta.
- Thompson, J. B. (2018). *Media and modernity: A social theory of the media*. Cambridge: Polity Press.
- Tyler, T. R., & Jackson, J. (2014). Popular legitimacy and the exercise of legal authority: Motivating compliance, cooperation, and engagement. *Psychology, Public Policy, and Law*, 20(1), 78–95.
- UNICEF. (2021). *Guidelines on child-centered communication*. New York: UNICEF.
- Wahyudi, A. (2022). *Komunikasi publik dan strategi Polri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.